



Optimis

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	KABAG PERENCANAAN	13/01/25	A.
2	KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN		A
3	KABAG SUMBER DAYA MANUSIA	14/1/25	A.
4	KABAG BAGIAN HUKUM DAN KSLN	15/1/25	89
5	KABAG ORGANISASI DAN HUMAS	13/01/25	off
6	KABAG KEUANGAN	15/1/25	18

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LOLLAN PANJAITAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK 1	Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata Kelola unit kerja yang baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase kecukupan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	%	100
		IKK 2	Persentase keandalan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	%	92,5
		IKK 3	Persentase layanan bantuan hukum	%	100
		IKK 4	Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL	%	100
		IKK 5	Persentase monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%	100
		IKK 6	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%	100
		IKK 7	Persentase pencapaian PNBP	%	100
		IKK 8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	94

		IKK 9	Persentase layanan internal	%	100
		IKK 10	Persentase kegiatan pendukung	%	100
		IKK 11	Persentase penyelesaian penyusunan NSPK	%	100
SK 2	Meningkatnya dukungan manajemen terhadap kualitas tata Kelola unit kerja yang baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 12	Persentase layanan organisasi dan tata Kelola internal	%	100
		IKK 13	Persentase layanan manajemen SDM	%	100
		IKK 14	Persentase pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%	100
		IKK 15	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM lingkungan DJPL	%	100
		IKK 16	Persentase layanan perkantoran	%	100
		IKK 17	Persentase layanan umum	%	100
		IKK 18	Persentase layanan perencanaan	%	100

		IKK 19	Persentase layanan anggaran	%	100
		IKK 20	Persentase layanan pemantauan dan evaluasi	%	100
		IKK 21	Persentase layanan kehumasan	%	100
		IKK 22	Persentase layanan data dan informasi	%	100
		IKK 23	Persentase layanan hukum	%	100
		IKK 24	Persentase layanan kerjasama dan kemitraan	%	100
		IKK 25	Persentase perjanjian kerja sama bidang transportasi laut yang disepakati	%	100
		IKK 26	Persentase keterlibatan kesekretariatan DJPL dalam kerjasama internasional	%	100
		IKK 27	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	79,5
		IKK 28	Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yang disepakati	%	100
		IKK 29	Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) yang ditindaklanjuti	%	100

		IKK 30	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	82
		IKK 31	Nilai kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik	Nilai	3,8
		IKK 32	Persentase penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi bidang transportasi laut	%	100
		IKK 33	Persentase usulan pemanfaatan BMN yang ditindaklanjuti	%	100
		IKK 34	Nilai AKIP Setditjen Hubla	Nilai	80
		IKK 35	Persentase publikasi informasi melalui media sosial	%	90

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
4. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 34.831.714.000,00-
Rp. 225.777.787.000,00-
Rp. 28.083.901.000,00-
Rp. 135.759.804.000,00-

Disetujui,

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Jakarta,

2025

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001